

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Literatur Review**

Literatur review adalah penelitian terlebih terdahulu yang berisikan tentang peninjauan kembali atau pustaka – pustaka atau tulisan terdahulu yang terkait dengan tema yang sedang dibahas, yang dijadikan pembandingan untuk peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu. Dalam literatur review menjelaskan variabel bebas, variabel terikat dan keterlibatan antara keduanya. Sumber literatur review bisa berupa skripsi, jurnal, buku – buku ilmiah, tesis atau pun sumber lainnya yang dianggap relevan dengan objek penelitian saat ini. Penulis ingin menfokuskan penelitian kepada upaya yang dijalankan indonesia untuk meningkatkan sdm kehutanan dibidang kehutanan timor leste, dalam referensi pertama penulis menemukan tesis yang ditulis oleh Paulino saldanha, S.Kom dengan berjudul *Kebijakan Timor Leste Dalam Pengiriman Mahasi swa Ke Indonesia*.

Dalam penelitiannya, Paulino menyebutkan bahwa Timor Leste sangat memerlukan kerja sama – kerja sama yang bersifat kolektif dan terintegrasi. Upaya meningkatkan kerja sama dengan indonesia menjaadi salah satu agenda utama dalam politik luar negeri Timor Leste di era Xanana dan Ramos Horta, ketergantungan ini dapat dilihat dari segi peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang secara masif melanjutkan studi di

Indonesia khususnya di beberapa propinsi di Indonesia seperti, Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Malang dan kota propinsi lainnya.

Salah satu yang menjadi dasarnya juga karena Indonesia merupakan salah satu pilar utama di kawasan ASEAN yang sangat menguntungkan negara anggota yang ekonomi dan pendidikannya masih kurang stabil dibawa standar seperti Timor Leste. Meskipun Timor Leste belum masuk ASEAN, namun manfaat besar bagi Timor Leste dalam kerja sama di berbagai macam bidang terutama pendidikan, seperti pertukaran informasi, pembaharuan kurikulum berstandarisasi regional dan internasional, minimalisir informasi yang dapat memicu konflik antar negara, sehingga fokusnya dalam pengembangan di bidang pendidikan dengan Indonesia menjadi agenda utama, dengan memberikan beasiswa oleh negara yang terlibat dalam kerja sama tersebut, meningkatkan kesepakatan pembangunan manusia, melalui pertukaran tenaga ahli sehingga dapat membangkitkan pendidikan domestik Timor Leste.

Dan oleh sebab itu sehingga, kerja sama dengan Indonesia sangat memberikan jaminan bagi Timor Leste agar mengupayakan segala cara untuk segera memenuhi pendidikan domestik, terutama bagi Timor Leste adalah memperbaiki, mengelola dan menjaga stabilitas politik domestik agar tidak menjadi polemik dalam urusan kerja sama, menciptakan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas pendidikan yang diharapkan negara di masa yang akan datang. Mulai menginvestasikan di bidang pendidikan dan sumber daya alam sebagai sumber perekonomian yang mendorong kerja sama – kerja sama luar

negeri baik bilateral, multilateral dan regional. (Independente, Democratica, Leste, & Leste, 2002)

Dari yang penulis baca, Pauino menjelaskan bahwa sistem pendidikan Timor Leste masih rendah dan membutuhkan bantuan – bantuan dari berbagai negara untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Timor Leste. Dan Timor leste memilih Indonesia sebagai salah satu negara untuk tempat peningkatan kualitas dan bertukar informasi dalam bidang pendidikan, Ini juga yang menjadi landasan Indonesia membangun kerja sama lingkungan hidup dan kehutanan dengan Timor leste karena Timor Leste Memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah tetapi dalam pengelolaannya kurang baik.

Selanjutnya penulis menggunakan referensi Adirini Pujiyanti dalam skripsinya mengenai Kerja Sama Selatan – Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia. Yang didalamnya berisi tentang program KSS ditingkatkan dengan keyakinan bahwa Indonesia adalah “*a regional power with global interests and responsibilities*” sebagai anggota G-20 Indonesia ditempatkan sebagai *energizing econoy country*. Alokasi dana yang dikeluarkan Indonesia untuk bantuan Program ini masih kecil di masa pemerintahan SBY yaitu 10 juta dollar, dimana negara lain lebih diatas itu. Namun demikian Indonesia memiliki modalitas lain yang sangat penting, yaitu pengalaman keberhasilannya dalam transisi demokrasi sejak 1998, hal tersebut menjadi aset dalam pelatihan demokrasi, khususnya bagi negara – negara yang sedang mengalami transisi demokrasi.

Indonesia mengarahkan semua program KSS untuk kepentingan nasional, yang berdasarkan pertimbangan yang bersifat ekonomis, politis dan pencitraan. Dengan menekankan pendekatan kemitraan melalui cara berbagai pengalaman. Setiap program peningkatan kapasitas yang diberikan kepada negara penerima hendaknya mampu mengubah persepsi atau kebijakan suatu negara terhadap Indonesia menjadi semakin positif, menguntungkan bagi kepentingan nasional Indonesia. Bantuan Indonesia untuk negara berkembang pada umumnya diberikan dalam bentuk hibah dan berbagai bentuk pelatihan diantaranya di bidang pertanian, perikanan, *good government*, serta UKM. Sepanjang satu dekade terakhir ini, Indonesia telah menggelar lebih dari 700 program KSS yang bernilai di atas US\$ 60 juta dengan mitra negara – negara berkembang di Asia, Afrika dan Pasifik Selatan. Dengan berperan aktif dalam KSS posisi Indonesia semakin diperhitungkan di dunia Internasional sehingga mempermudah pencapaian kepentingan nasional.

Dalam masa ini Arus globalisasi yang semakin pesat saat ini telah membawa peluang dan tantangan dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia. Dalam upaya mengefektifkan KSS pemerintahan pusat berupaya melibatkan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan program KSS. Proses demokratisasi telah membuka peluang keterlibatan pemda termasuk melakukan interaksi dengan dunia Internasional. Sementara arus liberalisasi ekonomi dan politik sebagai efek globalisasi juga menuntut pemda untuk siap berkiprah di level Internasional. Hal tersebut dimungkinkan dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah mendapatkan

ruang yang lebih luas untuk menyelenggarakan hubungan internasional dan berinteraksi langsung di dunia Internasional. Peluang ini harus dimanfaatkan pemda untuk meningkatkan kapasitas pembangunan di daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan Adniani menjelaskan bahwa Indonesia Melanjutkan program KSS dengan cara menjadi negara pendonor untuk sesama negara berkembang. Langkah tersebut ditempuh Indonesia karena Indonesia mempunyai keyakinan sebagai ‘*a regional power with global interests and responsibilities*’ sebagai Anggota KAA dilanjutkan dengan Program KSS dan diimplementasikan dengan baik bahwa indonesia juga bisa meberikan donnor bukan hanya berupa materi tetapi juga imaterial yang tinggi.(Pujayanti, 2015)

Selanjutnya ada Paper yang ditulis oleh Dosen Imelda M. J. Sianipar, Ma yang berjudul Kerjasama Ekonomi (Trilateral) Indonesia, Australia, dan Timor Leste, yang didalamnya membahas tentang bagaimana usaha Timor Leste untuk dapat setara dengan negara – negara tetangganya dengan jalan kerjasama baik bilateral maupun multilateral, termasuk dalam kerjasama ekonomi tersebut. Hal ini penting, karena semua negara tidak bisa berdiri sendiri apalagi Timor leste yang merupakan negara baru, harus bisa membangun hubungan untuk memenuhi kepentingan nasional yang tidak bisa terpenuhi didalan negeri. Sumber daya alam yang dimiliki Timor Leste yang kaya dan terkenal dengan aneka hasil tambangnya seperti *Timor Gap*. Selain digunakan untuk memperoleh devisa negara dari hasil bumi untuk menunjang pembangunan, hal ini bisa menjadi modal tawar - menawar dengan Indonesia dan Australia untuk memberikan bantuan kepada Timor Leste dalam berbagai bentuk. Tetapi apabila Timor Leste bisa

memanfaatkan potensi yang dimilikinya dan dengan bantuan negara lain khususnya Australia, Portugal dan Indonesia bukan tidak mungkin perkembangan Timor Leste bisa lebih baik dari negara – negara di Asia Pasifik ataupun juga negara – negara di Asia Tenggara lainnya. Karena bila dibandingkan dengan potensi yang memiliki dengan negara di Kepulauan Pasifik seperti Kepulauan Solomon, Vanuatu, Tuvalu dan yang lainnya. Timor Leste lebih mempunyai potensi yang lebih baik, baik dilihat dari sumber daya atau kepercayaan internasional khususnya negara maju dalam kerjasama internasional. (*Kerjasama\_Ekonomi\_Trilateral\_Indonesia\_A*, n.d.)

Dari penelitian diatas, peneliti menggunakan teori kerjasama internasional, kepentingan nasional, diplomasi lingkungan, konsep SDGs dan teori neo realisme untuk mengetahui bagaimana Indonesia dalam membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kehutanan Timor Leste. Sebagaimana dapat dilihat dari beberapa peneliti terdahulu, analisis yang menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam membantu Timor Leste dalam peningkatan sumber daya manusia yang pertama adalah bagaimana Timor Leste sebagai negara yang masih kurang dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusianya berusaha mencari jalan keluar terbaiknya dengan melakukan beberapa kerjasama, yang kedua adalah faktor sejarah yang tidak dapat dilepas karena Timor Leste selain negara yang pernah menjadi bagian Indonesia tetapi juga negara tetangga yang harus dibantu Indonesia dengan berupa SDGs yang merupakan program lanjutan, merupakan sebuah langkah diplomasi lingkungan karena Indonesia mempunyai sistem pengelolaan Lingkungan Hidup

dan Kehutanan yang baik sehingga Timor Leste menilai bahwa Indonesia merupakan negara yang pas untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehutananya. Sehingga penelitian ini akan memfokuskan kepada usaha yang dilakukan Indonesia dalam membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kehutanan Timor Leste sebagaimana seperti yang tertuang di dalam MoU dan IA

### Kerangka Konseptual

Dalam penelitian teori merupakan komponen dasar yang digunakan dan sebagai salah satu tanda atau bukti dalam sebuah penelitian yang bersifat ilmiah. Merupakan sebuah kumpulan atau seperangkat konsep, pengertian atau penjelasan yang disusun secara sistematis sehingga teori yang digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian yang akan diteliti.

Hubungan internasional merupakan sebuah hubungan antara suatu negara atau individu dari suatu negara dalam bidang tertentu untuk kepentingan kedua belah pihak. Setiap negara memerlukan hubungan internasional karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan, untuk melengkapi kekurangannya dan mengurangi kelebihan suatu negara dibutuhkan hubungan dengan negara lain. Hubungan internasional meliputi tentang kerjasama, persahabatan, perselisihan, persengketaan, dan peperangan juga merupakan hubungan internasional.

### Definisi Kerjasama Internasional

Dalam membantu melihat bagaimana Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan Timor Leste, penulis menggunakan lima definisi yang dikemukakan oleh **K. J. Holstik** dalam mendefinisikan bagaimana kerjasama

internasional tersebut menjadi landasan untuk negara satu dan lainnya dalam menjalankan kerjasama internasional, definisinya adalah sebagai berikut :

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau berbenturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

(M. Tahrir Azhari, n.d.)

K. J. Holstik menjelaskan bahwa kerjasama internasional di umpamakan seperti tahap pengenalan sampai tahap bisa terjalinnya kerjasama tersebut, dimana dimulai dari menentukan pandangan, kepentingan, nilai atau tujuan dalam menjalin suatu kerjasama internasional tersebut untuk menghasilkan sesuatu atau mempromosikan atau hal yang harus dipenuhi oleh pihak yang menjalin kerjasama. Untuk hal ini Indonesia telah menentukan segala tahap awal untuk menjalin kerjasama sebagaimana Indonesia telah mengetahui tujuan dari dibuatnya Kerjasama Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu untuk membantu

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehutanan Timor Leste sebagaimana untuk pengelolaan DAS (daerah aliran Sungai) dan juga ( Beasiswa).

Pada tahap selanjutnya adalah harapan dari suatu negara bahwa nantinya kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya dapat membantu mencapai kepentingan ataupun nilai – nilai lainnya, disini Timor Leste sebagai negara yang mendapatkan bantuan dari negara Indonesia mengharapkan keputusan kebijakan yang dibuat dapat membantu Timor Leste dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang kehutanan sebagaimana yang tertuang dalam poin – poin kesepakatan MoU dan IA.

Pada tahap selanjutnya dalam Kerjasama Internasional adalah persetujuan atau penentuan masalah – masalah tertentu antara ke dua negara untuk menjadi landasan dalam pembuatan kerjasama yang memanfaatkan persamaan kepentingan atau berbenturan kepentingan, dalam Kerjasama Internasional antara Indonesia dan Timor Leste dalam hal ini Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Timor Leste yang berawal dari belum adanya kerjasama Indonesia – Timor leste di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang akhirnya dibuat dengan landasan bahwa Timor Leste memilih Indonesia sebagai negara yang bertanggung untuk membantu Daerah aliran Sungai batas negara dalam hal ini untuk bertukar informasi dalam pengelolaan serta dalam bentuk Pendidikan atau Pelatihan (Diklat) yaitu dengan pendidikan dan petukaran informasi mengenai pengelolaan yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dengan ketentuan MoU, IA dan Pengaturan pelaksanaan.

Di dalam tahap ini menjelaskan aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, Indonesia dan Timor leste telah membahas aturan resmi serta tak tertulis yang harus di taati serta yang tidak harus di taati secara terperinci di dalam MoU yang ditindak lanjuti melalui IA dan Pengaturan Pelaksanaan yang dijelaskan serta harus di selesaikan secara musyawarah jika ada aturan yang ingin diberhentikan sebelum perjanjian selesai atau adanya perpanjangan perjanjian yang sedang di berjalan.

Tahap terakhir adalah bagaimana transaksi perjanjian tersebut memenuhi persetujuan mereka, bisa dijalankan dengan berupa pembentukan Amandemen atau MoU atau IA dan Pengaturan Pelaksanaan. Dalam hal ini Indonesia dan Timor Leste memenuhi transaksinya melalui Pembuatan MoU saling pengertian, pengaturan DAS dan IA untuk beasiswa.

**Koenadi Kartasmita** juga mengatakan bahwa :

“Kerjasama Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional” (*Koesnadi Kartasmita, n.d.*)

Untuk dasar suatu kerjasama antar negara dilakukan oleh dua negara atau lebih adalah untuk memenuhi kebutuhan masing – masing dan mencapai kepentingan mereka. Kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang paling utama karena dasarnya kerjasama merupakan bentuk interaksi yang akan muncul

apabila ada dua orang atau kelompok yang saling bekerjasama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Kerjasama internasional merupakan suatu langkah negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya.

“Kerjasama internasional didefinisikan sebagai pola yang melintasi batas – batas negara, dengan didasari struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan – tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.” (“Rudy, 1993,” n.d.)

Pada hakekatnya kerjasama internasional di bagi menjadi empat bentuk,

yaitu :

1. Kerjasama universal ( global )

Kerjasama internasional yang bersifat universal atau global dapat dikembalikan pada hasrat untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita – cita bersama, dan menghindari disintegrasi internasional.

2. Kerjasama regional

Merupakan kerjasama antar negara yang berdekatan secara geografis. Yang amat menentukan pada kerjasama regional adalah kedekatan geografis. Namun, pengamatan menunjukkan, bahwa faktor itu saja belum memadai untuk memajukan suatu kerjasam regional. Kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, atau perbedaan struktur produktivitas ekonomi dari negara – negara yang hendak bekerja sama banyak menentukan apakah suatu kerjasama regional dapat diwujudkan.

### 3. Kerjasama fungsional

Kerjasama yang didasarkan pada fungsinya masing – masing, biasanya kerjasama ini meningkatkan bidang – bidang tertentu, misalnya: ekonomo, politik sosial budaya, dan lingkungan hidup.

### 4. Kerjasama ideologis

Merupakan kerjasama yang batas teritorial justru tidak relevan. Berbagai kelompok kepentingan yang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai keungkinan yang terbuka secara global. (“Kusumohamidjojo, 1987,” n.d.)

## Teori Hubungan Bilateral

Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa bangsa – bangsa di dunia ini akan melakukan interaksi antar – bangsa yang mana

terselenggaranya suatu hubungan internasional baik melalui berbagai kriteria seperti terselenggaranya suatu hubungan yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Sejalan dengan pendapat **kusmohamidjojo** tentang hubungan bilateral yakni :

“suatu bentuk kerjasama diantara negara – negara yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasara utama menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi” (“kusumohamidjojo, 1987, 3,” n.d.)

Menurut **anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani** mengatakan , dalam proses hubungan ilateral biasanya akan ditentukan oleh tiga motif yaitu :

6. Memelihara kepentingan nasional.
7. Memelihara perdamaian.
8. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi.(“Anak Agung Banyu dan Yayan Muhamaad Yani,” n.d.)

Menurut **Didi Krisna** dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa :

“Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi, hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara”. (“Krisna, 1993, 18,” n.d.)

Menggambarkan bahwa hubungan internasional merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara.

Dalam hubungan internasional, hubungan bilateral berada di dalam dua konteks yakni konflik dan kerjasama. Dalam hubungan internasional, kedua konteks tersebut berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika yang terjadi di hubungan internasional itu sendiri. Kerjasama bilateral dapat pula diartikan dengan adanya kepentingan yang menjadi dasar kesepakatan antara ke dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama.

### Teori Kepentingan Nasional

Sesudah *power*, kepentingan nasional adalah konsep yang paling populer dalam analisa hubungan internasional. Kepentingan Nasional adalah tujuan – tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan dengan hal yang dicita – citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan ( *Security*) dan Kesejahteraan ( *Prosperity* ). Kepentingan nasional diidentikkan dengan “tujuan nasional”. Seperti kepentingan pembangaunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing untuk mempercepat laju industrialisasi. (“Teori Kepentingan Nasional,” n.d.)

**Hans J. Morgenthau**, kepentingan nasional merupakan pilar utama bagi toerinya tentang politik luar negra dan politik internasional yang realis. Pendekatan morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam stdui politik internasional sesudah Perang Dunia II. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan – alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik – teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlah Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan ( *power* ) dan kepentingan ( *interest* ), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Para pengkritiknya terutama ilmuwan dari aliran saintifik, meuntut definisi operasional yang jelas tentang konsep – konsep dasar itu. Tetapi Morgenthau tetap bertahan pada pendapatnya bahwa konsep – konsep abstrak seperti kekuasaan dan kepentingan itu tidak dapat dan tidak boleh dikuantifikasikan. Menurut Morgenthau :

“Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”.

Menurut Morgenthau menyatakan bahwa kaitan ‘kepentingan nasional’ dan ‘kepentingan regional’ dinyatakan bahwa kepentingan nasional mendahului kepentingan regional. Bagi teoritis aliansi yang bermanfaat harus dilandasi oleh keuntungan kemanan timbal – balik negara – nagra yang ikut serta, bukan ikatan – ikatan ideologis atau moral. Suatu aliansi regional tidak betul – betul memenuhi kepentingan negara yang ikut ( seperti yang didefinisikan oleh pemerintahnya), tidak bertahan atau tidak aka efektif dalam jangka panjang. (“Hans J. morgenthau,” n.d.)

### **2.1.2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan ( *Sustainable Development Goals*)**

Pembangunan ekonomi memiliki hubungan dua arah dengan kesehatan. Pembangunan ekonomi mempengaruhi kesehatan populasi, sebaliknya kesehatan populasi mempengaruhi pembangunan ekonomu. Kesehatan merupakan sumberdaya yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Tingkat kesehatan populasi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan keluarga, yang secara agregat nasional meningkatkan Produk Domestik Bruto per kapita. Sebaliknya pembangunan ekonomu berpengaruh terhadap kemampuan keberlanjutan sistem pendukung yang diperlukan bagi populasi untuk menciptakan kesehatan kualitas hidup yang baik. Pembangunan ekonomi menggunakan sumberdaya alam, energi, dan sumberdaya manusia secara masif. Pembangunan ekonomi yang tidak terkontrol, penggunaan sumberdaya alam dan energi untuk produksi maupun konsumsi, yang tidak berhati – hati, hingga melebihi kapasitas

bumu, dapat merusak kondisi lingkungan sosial dan eko-sistem, sehingga menurunkan kesehatan dan kualitas hidup populasi.

Pembangunan yang bijak bagi masyarakat adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ( *Sustainable Development* ) adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang diseluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Tujuan tersebut bisa dicapai melalui empat elemen tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu :

1. Pertumbuhan dan keadilan ekonomi
2. Pembangunan sosial
3. Konservasi sumberdaya alam (perlindungan lingkungan)
4. Pemerintahan yang baik (*good governance*)

Keempat elemen tersebut saling mendukung satu dengan lainnya, menciptakan tujuan pembangunan yang berkaitan dan berkelanjutan.

Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa – Bangsa ( PBB ) yang diadakan di Rio de Janeiro ( Brasil ) pada juni 2012 dibahas agenda pembangunan berkelanjutan yang di sebut *Sustainable Development Goals* ( *SDGs* ), *SDGs* sendiri merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal.

Dalam perkembangannya *Sustainable Development Goals* secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, dan mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim. Berbeda dengan MDGs, SDGs menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan agar dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial ( seperti pendidikan, kesehatan, proteksi sosial, aneka kesempatan kerja), dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi lingkungan. (“Sustainable Development Goals,” n.d.)

SDGs menganut model keberlanjutan mutakhir, bukan lagi pilar yang melihat ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpisah atau *triple bottom line* yang biasanya melihat tiga perisai di antara ketiganya, melainkan model *nested* yang melihat hubungan ketiganya secara komprehensif : ekonomi bagian dari sosial, dan sosial bagian dari lingkungan. Ini berarti SDGs melihat bahwa tak ada tujuan yang terpisah apalagi bertentangan di antara ketiganya. Secara tegas, ini juga berarti hanya bentuk – bentuk ekonomi yang tunduk pada kepentingan sosial dan kelestarian lingkungan yang diperkenankan untuk dibangun dalam periode 2016 – 2030. (“SDGs,” n.d.)

## Diplomasi Lingkungan Hidup

Dalam dasawarsa terakhir ini dimana milenium baru akan tiba, para diplomat di seluruh dunia disibukan oleh kegiatan diplomatik untuk merundingkan berbagai kesepakatan global yang menyangkut persoalan global

yang menyangkut persoalan lingkungan hidup. Perundingan dari kota ke kota seperti New York, Jenewa, Wina, Montreal, Basel hingga Nairobi merupakan salah satu indikator meningkatnya diplomasi lingkungan hidup. Bahkan menurut **French** (1992) dalam tahun 1992 telah ditandai kegiatan diplomasi lingkungan hidup yang tiada taranya. Diplomasi lingkungan (*environmental diplomacy*) kini telah menjadi istilah populer beberapa diplomat yang terlibat dalam perundingan – perundingan internasional untuk mencapai berbagai perjanjian internasional baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*. Puncak dari kegiatan diplomasi lingkungan yang sangat penting di akhir abad ini adalah diadakannya konferensi Tingkat Tinggi Bumi atau Earth Summit yang berlangsung dikota Rio De Janeiro, Brazil pada bulan juni 1992. KTT Bumi ini dihadiri oleh berbagai kalangan dan merupakan salah satu pertemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Sebagai kelanjutan dari konferensi PBB mengenai Lingkungan hidup manusia 1972 yang diadakan di kota Stockhloem 1972, KTT Rio 1992 ini bertujuan untuk menghasilkan beberapa kesepakatan global dalam menghadapi abad 21. (“Diplomasi Lingkungan,” n.d.)

Diplomasi lingkungan mengalami beberapa perkembangan istilah dilomasi ozon (Benedick, 1991) atau juga diplomasi satwa, *bio – diplomacy*, *Conservation Diplomacy*, *Nuclear Diplomacy* dan lain – lain yang tidak terlepas dari sejarah diplomasi lingkungan hidup. Dalam hal ini perundingan – perundingan yang menyangkut masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah jauh dilakukan. Sejarah diplomasi lingkungan hidup ternyata telah mencatat berbagai perkembangan yang cukup berarti dibidang lingkungan hidup.

**Borg** mendefinisikan bahwa :

“Diplomasi lingkungan dapat didefinisikan sebagai keahlian dalam menangani persoalan – persoalan lingkungan hidup yang memiliki dampak dalam lingkup internasional” (“Borg, 1994,” n.d.)

Dari definisi Borg diatas, seperti juga **Bur dan Salow** (1975) telah menunjukkan bahwa keahlian atau keberhasilan seorang diplomat dalam hubungan internasional khususnya untuk mengetahui serta memahami persoalan lingkungan hidup yang berkaitan dengan hal ini. Selain itu ada beberapa prinsip – prinsip dasar dalam diplomasi lingkungan. Borg (1992) berpendapat bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai prinsip dasar (*basic principles*) dalam melakukan diplomasi lingkungan, seperti :

- a. Perjanjian atau konvensi internasional sebagai petunjuk (*guidelines*) dalam praktek negara – negara.
- b. Status dari prinsip – prinsip hukum lingkungan internasional.
- c. Tindakan preventif telah dapat dimengerti dalam mencapai konsensus diantara negara – negara.
- d. Kebutuhan akan informasi dan konsultasi diantara negara – negara.
- e. Hukum kebiasaan internasional yang mengalami proses sejarah yang panjang.

- f. Keputusan pengadilan internasional yang dapat melibatkan agen diplomatik.
- g. Berbagai resolusi badan – badan PBB serta deklarasi - deklarasi yang dihasilkan dalam pertemuan internasional yang akan mempengaruhi politik luar negeri.
- h. Keputusan UNEP yang meletakkan berbagai prinsip dan petunjuk dan dapat mempengaruhi penggunaan dan tujuan diplomasi lingkungan.
- i. Laporan – laporan dari Komisi Hukum Internasional ( ILC ) yang berpengaruh besar dalam persoalan lingkungan.
- j. Pendapat umum, tekanan – tekanan dari LSM/NGO internasional yang akan mempengaruhi pembentukan opini masyarakat internasional. (“Borg, 1992,” n.d.)

Tujuan pokok yang ingin dicapai dalam diplomasi lingkungan diantaranya adalah berupaya untuk mencoba menerapkan hukum lingkungan internasional dan melanjutkan dengan apa yang telah disepakati. Hukum internasional ini telah memberikan hak dan kewajiban yang menjaga sistem keseimbangan diantara negara, satuan dan bukan negara dan masyarakat internasional lainnya. Karena diplomasi lingkungan akan berperan penting dalam sistem politik internasional.

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah serta rumusan masalah diatas, maka penulis menuliskan hipotesis penelitian yaitu ;

*“ Bagaimana implementasi program yang diberikan Indonesia dalam bentuk Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pendidikan (Beasiswa) dapat membantu kapasitas Sumber Daya Alam kehutanan di Timor Leste meningkat “*

### Operasional Variabel

Untuk membantu menganalisis dan menverifikasi dalam pembuatan terhadap hipotesis diatas, maka dibawah ini terdapat tabel operasional, variabel yang didalamnya terdapat indikator – indikator atas vsriabel – variabel yang bisa menjadikan indikator dalam penelitian ini, yakni dengan :

Variabel (Konsep Teoritik)	Indikator (Empirik)	Variabel (Analisis)
Variabel Bebas : Terjalannya kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dengan Timor Leste	1. Pada 25 Agustus 2015 di Jakarta, MoU Tentang Kerja sama Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Demokratik Timor Leste tentang Kerja Sama Teknis tentang Sektor Kehutanan ditandatangani	Beberapa faktor mempengaruhi terwujudnya kerjasama Republik Indonesia dan Demokratik Timor Leste, salah satunya adalah belum adanya kerjasama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan antara

	<p>oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mewakili Republik Indonesia dan Menteri Senior, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pertanian dan Perikanan Demokratik Timor Leste.</p>	<p>Indonesia dan Timor Leste</p>
<p>Variabel Terikat : Maka Timor Leste mendapatkan upaya – upaya yang dapat membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kehutanan Timor Leste</p>	<p>1. Implementation Arrangement (IA) terbentuk Sebagai tindak lanjut MoU kerjasama teknis tentang sektor kehutanan yang berisi tentang <i>technical Cooperation On Capacity Building</i> yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK mewakili Republik Indonesia dan Direktur Jendral Kehutanan, Kopi dan</p>	<p>1. Untuk menindak lanjuti MoU yang telah disepakati, Indonesia dan Timor Leste mengambil upaya lebih lanjut yaitu dibentuknya IA yang akan menfokuskan kepada kerjasama teknis dalam pengembangan kapasitas yang</p>

	<p>Tanaman Industri, Kementerian Pertanian dan Perikanan mewakili Timor Leste pada 27 Juni 2016.</p> <p>2. Dalam IA terdapat beberapan poin upaya yang akan dilakukan Indonesia, di dalam beberapa poin tersebut, terdapat dua poin yang sudah berjalan yaitu :</p> <p>a. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lintas Batas Negara, yang sudah berupa Pengaturan pelaksanaan</p> <p>b. Pemberian Beasiswa yang berlangsung tiap tahunnya dan berlangsung sejak tahun 2016. Dimana tiap tahunnya sebanyak 5 orang peserta yang akan belajar di SMKKN</p>	<p>difokuskan dalam IA ini adalah upaya – upaya yang akan dilakukan Indonesia untuk membantu Timor Leste dalam peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan.</p> <p>2. Dalam upaya mewujudkan Kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang kehutanan Timor Leste, Indonesia melakukan realisasi tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lintas Negara yang sudah berupa</p>
--	---	--

		<p>peraturan pengaturan pelaksanaan yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang kedua dengan mewujudkan beasiswa untuk anak – anak Timor Leste yang bisa berkesempatan melakukan pertukaran pendidikan diindonesia dengan adanya beasiswa ini.</p>
--	--	--

### Skema dan Alur Penelitian



